Profil Data Berbasis Gender

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan profil data berbasis gender yang komprehensif untuk Kabupaten Bengkayang dengan fokus pada domain yang relevan bagi Kantor Kementerian Agama. Analisis ini mengintegrasikan data demografi, ekonomi, dan sosial dari Badan Pusat Statistik (BPS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang 2021-2026, serta data programatik dari berbagai instansi terkait.

Temuan utama mengungkapkan sebuah paradoks: di satu sisi, Kabupaten Bengkayang menunjukkan indikator makro kesetaraan gender yang tinggi, seperti Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang unggul di tingkat provinsi dan partisipasi perempuan yang dominan dalam aparatur sipil negara. Namun, di sisi lain, data di tingkat akar rumput menunjukkan tantangan signifikan yang dihadapi perempuan, termasuk tingkat pendidikan rata-rata yang rendah, partisipasi angkatan kerja formal yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, serta isu kesehatan ibu dan anak yang krusial seperti prevalensi stunting dan angka kematian bayi yang masih menjadi perhatian.

Perempuan di Bengkayang merupakan pilar utama dalam ekonomi informal, khususnya di sektor pertanian melalui Kelompok Wanita Tani (KWT), dan menjadi motor penggerak kegiatan komunitas melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Namun, kontribusi vital ini belum sepenuhnya tercermin dalam kepemimpinan formal, termasuk di lingkungan institusi keagamaan.

Laporan ini merekomendasikan agar Kantor Agama Kabupaten Bengkayang mengadopsi pendekatan strategis berbasis data untuk mengarusutamakan gender. Rekomendasi kunci mencakup: (1) **Reformasi Institusional**, dengan mewajibkan pengumpulan dan analisis data terpilah gender di semua layanan dan melakukan audit internal untuk mengatasi hambatan karir bagi perempuan; (2) **Revitalisasi Program**, terutama mengubah program Bimbingan Perkawinan menjadi platform pengembangan keluarga yang holistik dengan mengintegrasikan materi kesehatan, literasi finansial, dan pencegahan KDRT; dan (3) **Penguatan Kemitraan Strategis**, dengan memformalkan kerja sama dengan organisasi perempuan seperti PKK dan KWT untuk menyinergikan program dan memperluas jangkauan pemberdayaan di tingkat komunitas. Implementasi rekomendasi ini akan memperkuat peran Kantor Agama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkeadilan, sejalan dengan visi pembangunan daerah.

Bagian 1: Profil Sosio-Demografi dan Ekonomi Kabupaten Bengkayang: Perspektif Gender

1.1. Dinamika Kependudukan

Fondasi analisis gender dimulai dari pemahaman struktur demografi suatu wilayah. Berdasarkan data publikasi "Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2024", populasi Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 mencapai 298.979 jiwa. Dari jumlah tersebut, komposisinya terdiri dari 155.120 penduduk laki-laki dan 143.859 penduduk perempuan.

Dari data ini, dihitung Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) sebesar 108, yang berarti terdapat 108 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Bengkayang. Angka ini secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi, menunjukkan adanya kelebihan populasi laki-laki. Kondisi demografis yang tidak seimbang ini bukan sekadar angka statistik; ia mencerminkan dan berpotensi membentuk realitas sosial yang kompleks. Ketidakseimbangan ini kemungkinan besar didorong oleh pola migrasi selektif gender, di mana laki-laki datang ke wilayah ini untuk bekerja di sektor-sektor padat karya yang dominan seperti perkebunan dan pertambangan. Implikasi sosial dari fenomena ini sangat relevan bagi Kantor Agama. Hal ini dapat menciptakan tekanan pada "pasar perkawinan" (

marriage market), memengaruhi usia pernikahan, dan berpotensi meningkatkan jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan atau perempuan dalam hubungan jarak jauh dengan pasangan yang bekerja secara migratoris. Oleh karena itu, program-program yang diselenggarakan oleh Kantor Agama, khususnya Bimbingan Perkawinan, perlu dirancang untuk peka terhadap konteks demografis ini, dengan memberikan penekanan pada manajemen konflik dan keuangan dalam keluarga dengan pola kerja yang tidak menentu.

Tabel 1.1: Komposisi Penduduk Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Jenis Kelamin, 2023

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	155.120	51,88
Perempuan	143.859	48,12
Total	298.979	100,00
Rasio Jenis Kelamin	108	-
Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, 2024		

1.2. Peta Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan determinan kunci bagi pemberdayaan individu dan kemajuan sosial. Di Kabupaten Bengkayang, data menunjukkan gambaran yang kontras. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk pada tahun 2023 tercatat 7,22 tahun. Angka ini berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 7,71 tahun,

mengindikasikan bahwa secara umum, penduduk Bengkayang belum menamatkan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Namun, sebuah dikotomi yang tajam muncul ketika melihat data di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Partisipasi perempuan dalam birokrasi pemerintah menunjukkan pencapaian pendidikan yang tinggi. Pada tahun 2020, dari total 2.152 PNS perempuan, sebanyak 87,4% memiliki latar belakang pendidikan tinggi, mulai dari Diploma-1 hingga Magister (S-2).

Realitas yang terbelah ini menunjukkan adanya dua kelompok perempuan yang berbeda secara fundamental di Bengkayang: segelintir perempuan berpendidikan tinggi yang berhasil memasuki sektor formal profesional, dan mayoritas perempuan di populasi umum yang menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses pendidikan lanjutan. Kesenjangan ini memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas program-program penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kantor Agama. Sebuah pendekatan "satu ukuran untuk semua" dalam Bimbingan Perkawinan atau penyuluhan keluarga tidak akan efektif. Kelompok perempuan berpendidikan tinggi mungkin membutuhkan diskusi mendalam tentang hak-hak hukum dalam perkawinan, keseimbangan karir dan keluarga, serta perencanaan keuangan modern. Sebaliknya, kelompok dengan RLS lebih rendah memerlukan literasi dasar mengenai kesehatan ibu dan anak untuk pencegahan stunting, cara mengenali kekerasan dalam rumah tangga, serta pengelolaan anggaran rumah tangga yang sederhana. Dengan demikian, Kantor Agama harus mengadopsi pendekatan program yang tersegmentasi, mengembangkan materi dan metode penyampaian yang berbeda untuk menjembatani kesenjangan pendidikan ini secara efektif.

1.3. Partisipasi Ekonomi

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Bengkayang, dengan kontribusi sebesar 33% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun demikian, data ketenagakerjaan formal menunjukkan adanya kesenjangan gender. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2020 adalah 63,29%, jauh di bawah TPAK laki-laki yang mencapai 87,24%.

Angka TPAK yang lebih rendah ini berpotensi memberikan gambaran yang tidak lengkap mengenai aktivitas ekonomi perempuan. Data kualitatif dan laporan kegiatan menunjukkan bahwa perempuan sangat aktif di ranah ekonomi informal dan komunitas. Mereka menjadi motor penggerak Kelompok Wanita Tani (KWT) yang berperan vital dalam ketahanan pangan keluarga dan kini mulai merambah kewirausahaan digital. Peran perempuan dalam berbagai tahapan aktivitas pertanian, mulai dari penanaman hingga pascapanen, juga sangat signifikan, meskipun seringkali tidak tercatat sebagai pekerjaan formal.

Adanya diskrepansi antara indikator ekonomi formal dan realitas kontribusi ekonomi perempuan ini menyoroti fenomena "kerja tak terlihat" (*invisible work*). Pekerjaan perempuan, yang seringkali bersifat informal atau dianggap sebagai bagian dari tugas rumah tangga, tidak terhitung dalam statistik resmi. Kondisi ini menempatkan perempuan dalam posisi rentan, karena tanpa pengakuan formal, mereka seringkali kesulitan mengakses kredit, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. Kantor Agama, melalui program-program pembinaan keluarga dan keagamaan, memiliki posisi strategis untuk mengatasi

kesenjangan ini. Dengan mengintegrasikan materi literasi finansial dan manajemen usaha kecil ke dalam program-programnya, bekerja sama dengan entitas seperti PKK dan KWT, Kantor Agama dapat membingkai pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai komponen inti dalam membangun "keluarga sakinah". Hal ini akan mengubah persepsi, dari yang semula menganggap aktivitas ekonomi perempuan sebagai hal sekunder, menjadi sebuah pilar utama bagi stabilitas dan kesejahteraan keluarga.

1.4. Indeks Pembangunan Manusia dan Kesetaraan Gender

Kabupaten Bengkayang menunjukkan capaian yang patut diperhatikan dalam indikator pembangunan makro. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah ini termasuk dalam empat besar di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021. Lebih lanjut, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2020 mencapai angka 71,96, menempatkan Bengkayang di peringkat kedua tertinggi di provinsi tersebut.

Namun, tingginya angka IDG ini menghadirkan sebuah paradoks kebijakan yang perlu dianalisis secara kritis. IDG sangat dipengaruhi oleh tiga dimensi: partisipasi perempuan dalam politik, partisipasi dalam ekonomi, dan pengambilan keputusan di tingkat profesional. Di Bengkayang, tingginya proporsi perempuan dalam birokrasi pemerintahan—di mana pada tahun 2020, 51,9% dari total PNS adalah perempuan—secara signifikan mendongkrak skor IDG.

Ketika skor IDG yang tinggi ini disandingkan dengan data lain seperti RLS yang rendah, TPAK perempuan yang lebih rendah, serta prevalensi stunting dan KDRT, menjadi jelas bahwa IDG tersebut kemungkinan besar terdistorsi oleh keberhasilan segelintir perempuan di sektor publik. Ini mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan dan pemberdayaan belum merata dan belum menyentuh mayoritas perempuan di tingkat akar rumput. Bagi Kantor Agama, hal ini menjadi peringatan penting: mengandalkan indikator makro seperti IDG untuk perencanaan program tidaklah cukup. Prioritas harus diberikan pada asesmen kebutuhan di lapangan yang berfokus pada mayoritas perempuan yang kehidupannya tidak tercermin dalam metrik tingkat tinggi tersebut. Narasi sesungguhnya mengenai gender di Bengkayang adalah tentang ketidaksetaraan yang mendalam, yang tersamarkan oleh kemajuan yang dicapai oleh kelompok minoritas.

Tabel 1.2: Perbandingan Indikator Pembangunan Manusia dan Gender, Bengkayang vs. Provinsi Kalbar (2020-2023)

Indikator	Tahun	Kabupaten Bengkayang	Provinsi Kalimantan Barat	Keterangan
IPM	2021	67,87	67,90	Bengkayang termasuk 4 besar di Kalbar
IDG	2020	71,96	68,07	Bengkayang peringkat 2 di Kalbar

RLS (Tahun)	2023	7,22	7,71	Di bawah rata-rata provinsi
TPAK Perempuan (%)	2020	63,29	-	Jauh di bawah TPAK Laki-laki (87,24%)
Sumber: BPS, RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026				

Bagian 2: Kondisi Keluarga dan Kehidupan Beragama: Analisis Berbasis Gender

2.1. Tren Perkawinan dan Perceraian

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang periode 2015-2020 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten baik pada jumlah penerbitan Akta Perkawinan maupun Akta Perceraian. Kenaikan simultan ini mengindikasikan dinamika sosial yang kompleks. Di satu sisi, perkawinan tetap menjadi institusi sosial yang sentral. Di sisi lain, stabilitas lembaga perkawinan menghadapi tantangan yang semakin besar.

Tren ini bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Peningkatan angka perceraian harus dilihat sebagai gejala dari pergeseran sosio-ekonomi yang lebih luas, sebagaimana diuraikan pada Bagian 1. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan yang masih rendah, tekanan ekonomi rumah tangga, dan pada saat yang sama, peningkatan bertahap agensi ekonomi perempuan, dapat berkontribusi pada ketegangan dalam perkawinan. Tekanan ekonomi dapat memicu konflik, sementara peningkatan kemandirian perempuan dapat memberdayakan mereka untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat atau abusif.

Kondisi ini menuntut respons proaktif dari Kantor Agama. Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan titik intervensi negara yang paling strategis dan universal bagi calon pasangan. Oleh karena itu, kurikulum Bimwin tidak lagi cukup jika hanya berfokus pada aspek doctrinal atau administratif. Untuk menjawab tantangan kontemporer, program ini harus direvitalisasi dengan mengintegrasikan modul-modul praktis yang relevan dengan akar masalah perceraian, seperti manajemen keuangan keluarga, resolusi konflik, pola asuh bersama (*co-parenting*), serta pemahaman mengenai hak dan perlindungan hukum dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2.2. Demografi Keagamaan dan Partisipasi Publik

Kabupaten Bengkayang memiliki lanskap keagamaan yang sangat beragam. Meskipun data spesifik mengenai jumlah pemeluk agama berdasarkan jenis kelamin tidak tersedia, data jumlah rumah ibadah pada tahun 2020 dapat menjadi proksi yang baik untuk menggambarkan keberagaman ini. Terdapat 371 Gereja Protestan, 186 Gereja Katolik, 185 Masjid, 108 Musala, dan 79 Klenteng yang tersebar di seluruh wilayah. Keberagaman ini

menjadikan isu kerukunan umat beragama sebagai salah satu prioritas utama dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026, yang menekankan pentingnya menjaga toleransi dan harmoni sosial.

Dalam konteks ini, perempuan seringkali memainkan peran sentral sebagai agen perdamaian dan perekat kohesi sosial di tingkat komunitas. Melalui organisasi seperti PKK, perempuan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang melintasi batas-batas keagamaan. Peran informal namun krusial ini merupakan aset sosial yang dapat dimanfaatkan dan diperkuat oleh Kantor Agama dalam program-programnya yang bertujuan untuk mempromosikan dialog dan kerukunan antarumat beragama.

2.3. Partisipasi Ibadah Haji

Partisipasi dalam ibadah haji merupakan salah satu indikator penting dalam kehidupan beragama umat Islam. Data keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Bengkayang untuk musim haji tahun 2024 menunjukkan partisipasi gender yang seimbang. Dari total 66 calon jemaah, 34 di antaranya adalah perempuan dan 32 adalah laki-laki.

Keseimbangan ini merupakan sebuah "penyimpangan positif" (*positive deviance*) yang menarik. Di tengah berbagai kesenjangan gender yang teridentifikasi di bidang lain seperti pendidikan dan partisipasi ekonomi formal, akses perempuan terhadap ibadah haji—sebuah kegiatan yang membutuhkan sumber daya finansial yang signifikan dan dukungan sosial yang kuat—ternyata setara dengan laki-laki. Beberapa faktor yang mungkin menjelaskan fenomena ini antara lain adalah praktik tabungan berbasis keluarga, nilai sosial yang tinggi yang dilekatkan pada status haji bagi perempuan maupun laki-laki, serta masa tunggu yang sangat panjang (diperkirakan mencapai 35 tahun per tahun 2023), yang memungkinkan perencanaan keuangan jangka panjang.

Kantor Agama dapat memanfaatkan temuan ini sebagai model keberhasilan. Dengan mempelajari secara mendalam faktor-faktor yang memungkinkan partisipasi setara perempuan dalam ibadah haji, Kantor Agama dapat mengidentifikasi strategi yang dapat direplikasi untuk mendorong partisipasi perempuan di area lain, seperti dalam kepemimpinan lembaga keagamaan, pengelolaan wakaf, atau keterlibatan dalam forum-forum dialog antar-iman.

Tabel 2.1: Jumlah Calon Jemaah Haji Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Jenis Kelamin, 2024

Jenis Kelamin	Jumlah Calon Jemaah	Persentase (%)
Perempuan	34	51,5
Laki-laki	32	48,5
Total	66	100,0
Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, 2024		

Bagian 3: Isu-Isu Sosial Kunci Terkait Gender di Bengkayang

3.1. Kesehatan dan Kesejahteraan

Kesehatan ibu dan anak merupakan cerminan dari kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan menjadi isu yang sangat gender-sensitif. Kabupaten Bengkayang menghadapi tantangan serius di bidang ini. Meskipun menunjukkan tren penurunan, prevalensi stunting masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 23,4% pada tahun 2024, turun dari 32,7% pada tahun 2023. Angka Kematian Bayi (AKB) juga menjadi perhatian utama, dengan 74 kasus kematian tercatat pada tahun 2024, yang setara dengan rasio 18,3 per 1.000 kelahiran hidup. Faktor-faktor penyebabnya antara lain adalah asfiksia, bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), dan rendahnya kesadaran ibu untuk memeriksakan bayinya ke fasilitas kesehatan.

Indikator-indikator ini secara fundamental terkait dengan kondisi perempuan. Stunting merupakan manifestasi dari masalah gizi kronis yang siklusnya seringkali dimulai dari kesehatan dan nutrisi ibu sebelum, selama, dan setelah kehamilan. Tingginya AKB mengindikasikan adanya kesenjangan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan maternal, serta rendahnya literasi kesehatan di kalangan ibu. Ini bukan sekadar isu medis, melainkan isu keluarga dan komunitas di mana Kantor Agama dapat memainkan peran strategis.

Kantor Agama Kabupaten Bengkayang memiliki jaringan 96 Penyuluh Agama (PNS dan non-PNS) yang tersebar di seluruh wilayah. Para penyuluh ini memiliki akses reguler dan hubungan kepercayaan yang kuat dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Potensi ini dapat dioptimalkan dengan membekali mereka pengetahuan dasar tentang kesehatan ibu dan anak. Dengan melatih para penyuluh untuk mengintegrasikan pesan-pesan kunci—seperti pentingnya pemeriksaan kehamilan (ANC), gizi seimbang bagi ibu hamil, dan manfaat ASI eksklusif—ke dalam materi khotbah, ceramah, dan sesi konseling keluarga, mereka dapat bertransformasi menjadi agen perubahan kesehatan publik. Intervensi ini memanfaatkan modal sosial yang sudah ada untuk mengatasi masalah kesehatan yang krusial, menjadikannya sebuah strategi yang berbiaya rendah namun berpotensi memberikan dampak yang tinggi.

3.2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KDRT)

Kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam ranah domestik, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menjadi penghambat utama bagi terwujudnya kesetaraan gender. Data yang tersedia mengindikasikan bahwa KDRT adalah masalah nyata di Bengkayang, dengan 29 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan hingga September 2020. Angka ini harus dipandang sebagai puncak gunung es, mengingat KDRT adalah kejahatan yang seringkali tidak dilaporkan karena dianggap sebagai masalah privat keluarga. Pemerintah daerah sendiri telah mengakui urgensi isu ini dengan memasukkan Program Perlindungan Perempuan dalam RPJMD 2021-2026.

Institusi keagamaan, termasuk Kantor Agama dan jajarannya seperti Kepala KUA dan penyuluh, seringkali menjadi garda terdepan dan titik kontak pertama bagi keluarga yang mengalami krisis. Peran mereka bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, interpretasi teks keagamaan yang sempit dan patriarkal dapat digunakan untuk menjustifikasi subordinasi perempuan dan menghalangi korban untuk melapor, dengan menasihati untuk "bersabar" atau "menjaga aib keluarga". Hal ini menjadikan institusi agama sebagai penghalang potensial bagi korban untuk mencari keadilan dan keamanan.

Namun, di sisi lain, institusi yang sama memiliki otoritas moral yang sangat besar di masyarakat. Otoritas ini dapat menjadi kekuatan transformatif jika digunakan secara konstruktif. Kantor Agama memiliki tanggung jawab untuk secara aktif melawan interpretasi yang merugikan dan mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang dalam keluarga. Ini memerlukan langkah konkret: menyelenggarakan pelatihan wajib bagi seluruh Kepala KUA dan Penyuluh Agama mengenai perspektif gender yang adil, memberikan pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Penghapusan KDRT, dan membangun protokol yang jelas untuk merujuk korban ke layanan profesional seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan kepolisian. Dengan demikian, Kantor Agama dapat beralih peran dari penghalang potensial menjadi bagian integral dari ekosistem perlindungan bagi perempuan dan anak.

3.3. Pemberdayaan Perempuan di Ranah Komunitas

Di tengah berbagai tantangan, perempuan di Bengkulu menunjukkan agensi dan kapasitas yang luar biasa melalui organisasi-organisasi komunitas. Mereka adalah tulang punggung dari gerakan sosial dan ekonomi di tingkat desa. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) aktif dalam berbagai program vital, mulai dari pencegahan stunting, pelayanan kesehatan dasar melalui Posyandu, hingga program-program kesejahteraan keluarga lainnya.

Di sektor ekonomi, Kelompok Wanita Tani (KWT) menjadi motor penggerak ketahanan pangan keluarga dan peningkatan pendapatan. Mereka tidak hanya mengelola lahan pertanian tetapi juga terus berinovasi, seperti yang terlihat dari adanya program pelatihan kewirausahaan dan literasi digital untuk anggota KWT.

Organisasi-organisasi ini secara de facto berfungsi sebagai mesin pembangunan sosial dan ekonomi di Bengkulu. Aktivitas mereka selaras secara langsung dengan berbagai tujuan yang dicanangkan pemerintah dalam RPJMD. Hal ini menunjukkan adanya potensi sinergi yang besar namun belum tergarap secara optimal. Saat ini, Kantor Agama dan kelompok-kelompok perempuan ini seringkali bekerja secara paralel untuk mencapai tujuan yang sama, seperti kesejahteraan keluarga dan stabilitas ekonomi.

Untuk memaksimalkan dampak, Kantor Agama perlu beralih dari pola interaksi yang bersifat ad-hoc menjadi kemitraan strategis yang terstruktur. Ini adalah sebuah imperatif strategis. Langkah-langkah konkret dapat mencakup penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dengan pimpinan TP-PKK dan koordinator KWT tingkat kabupaten, pengembangan rencana kerja tahunan bersama, dan penugasan Penyuluh Agama tertentu sebagai penghubung (*liaison*) untuk kelompok-kelompok ini. Kolaborasi ini dapat mewujudkan dalam bentuk pengembangan

modul penyuluhan bersama, misalnya mengintegrasikan materi literasi finansial dari pelatihan KWT ke dalam kurikulum Bimbingan Perkawinan. Kemitraan semacam ini akan mengamplifikasi dampak dari program kedua belah pihak, menciptakan sinergi yang kuat untuk pembangunan komunitas yang berkelanjutan.

Bagian 4: Profil Kelembagaan Kantor Agama Bengkayang dalam Lensa Gender

4.1. Komposisi Sumber Daya Manusia

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang didukung oleh 96 orang Penyuluh Agama, yang terdiri dari status PNS dan Non-PNS. Data spesifik mengenai komposisi gender di lingkungan Kemenag Bengkayang tidak tersedia secara rinci. Namun, sebagai perbandingan, data kepegawaian nasional menunjukkan bahwa perempuan merupakan mayoritas dalam ASN, dengan proporsi berkisar antara 54% hingga 56%. Tren ini juga tercermin di tingkat Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara umum, di mana perempuan mendominasi jumlah PNS.

Meskipun demikian, data kualitatif dari pemberitaan media mengenai pelantikan pejabat di lingkungan Kemenag di wilayah Kalimantan Barat menunjukkan bahwa posisi-posisi kepemimpinan strategis, seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), secara dominan diisi oleh laki-laki. Hal ini mengindikasikan adanya potensi fenomena "langit-langit kaca" (

glass ceiling) di dalam birokrasi keagamaan lokal.

Kondisi ini merupakan sebuah anomali. Ketika Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara umum telah menunjukkan kemajuan dalam menempatkan perempuan di berbagai posisi, Kantor Agama sebagai sebuah institusi vertikal tampaknya belum sepenuhnya sejalan dengan tren progresif tersebut. Ini menunjukkan kemungkinan adanya hambatan struktural atau budaya yang spesifik di dalam sektor urusan agama yang menghambat kemajuan karir perempuan ke jenjang pimpinan. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan agar Kantor Agama Bengkayang melakukan audit gender internal. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara sistematis hambatan-hambatan tersebut—baik yang terdapat dalam kriteria promosi, kesempatan pengembangan kapasitas, maupun bias implisit—dan selanjutnya merumuskan strategi afirmatif untuk memastikan praktik kepegawaian internalnya selaras dengan prinsip kesetaraan gender yang lebih luas.

4.2. Analisis Program Unggulan: Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan salah satu program inti dan layanan unggulan yang diselenggarakan oleh KUA di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bengkayang. Program ini memiliki jangkauan yang sangat luas karena menjadi prasyarat bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Di Bengkayang, program ini telah menunjukkan kapasitasnya untuk berinovasi dan merespons isu-isu sosial kontemporer. Sebuah contoh nyata adalah kolaborasi yang dijalin antara Kemenag Bengkayang dengan Badan Narkotika

Nasional (BNN) Kabupaten Bengkayang untuk mengintegrasikan materi pencegahan dan bahaya narkoba ke dalam kurikulum Bimwin.

Inisiatif ini merupakan sebuah kekuatan dan model yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Mengingat Bimwin adalah titik sentuh yang bersifat wajib bagi hampir semua pasangan yang akan membentuk keluarga baru, program ini memiliki potensi strategis yang luar biasa. Platform ini dapat ditransformasikan dari sekadar pemenuhan syarat administratif pra-nikah menjadi sebuah "Pusat Pengembangan Ketahanan Keluarga" yang holistik.

Transformasi ini dapat diwujudkan dengan secara sistematis mengintegrasikan modul-modul yang menjawab isu-isu krusial yang telah diidentifikasi dalam laporan ini. Dengan menjalin kemitraan formal, Kantor Agama dapat memasukkan: (a) materi Kesehatan Ibu dan Anak serta Pencegahan Stunting, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan; (b) materi Literasi Keuangan Keluarga Dasar, bekerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan (c) materi Literasi Hukum mengenai Pencegahan KDRT dan Hak-hak dalam Perkawinan, bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A). Dengan demikian, Kantor Agama dapat memanfaatkan program yang sudah ada untuk memberikan intervensi multi-sektoral yang berdampak tinggi, tepat pada momen krusial pembentukan sebuah keluarga baru.

4.3. Sinkronisasi dengan Tujuan Pembangunan Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Agama Kabupaten Bengkayang secara inheren selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Secara khusus, program-program tersebut berkontribusi langsung pada Misi 1, yaitu "Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius," serta mendukung pencapaian sasaran untuk "Meningkatkan kerukunan dan kehidupan beragama masyarakat".

Tantangan utama yang dihadapi saat ini bukanlah pada keselarasan tujuan, melainkan pada aspek akuntabilitas dan pengukuran dampak. Tanpa adanya pengumpulan dan pelaporan data terpilah gender yang sistematis, Kantor Agama akan kesulitan untuk mendemonstrasikan kontribusinya secara kuantitatif dan terukur. Misalnya, sulit untuk menilai sejauh mana program bimbingan keluarga berhasil menurunkan angka perceraian yang diinisiasi karena masalah ekonomi, atau bagaimana penyuluhan keagamaan berkontribusi pada peningkatan kesadaran kesehatan ibu hamil. Ketiadaan data ini melemahkan kemampuan institusi untuk melakukan evaluasi berbasis bukti dan menunjukkan nilai tambah spesifiknya dalam pencapaian target-target pembangunan daerah yang lebih luas.

Bagian 5: Analisis Strategis dan Rekomendasi untuk Pengarusutamaan Gender

5.1. Sintesis Temuan

Analisis data komprehensif mengenai Kabupaten Bengkayang menyingkap sebuah narasi yang penuh dengan paradoks. Di tingkat makro, daerah ini menunjukkan skor Indeks Pemberdayaan Gender yang tinggi, yang sebagian besar ditopang oleh partisipasi perempuan yang kuat di sektor aparatur sipil negara. Namun, gambaran ini menutupi ketidaksetaraan yang mendalam di tingkat akar rumput, di mana mayoritas perempuan menghadapi tantangan dalam akses pendidikan, partisipasi ekonomi formal, dan kesehatan.

Perempuan adalah aktor sentral dalam ekonomi informal dan kehidupan komunitas. Mereka menunjukkan agensi yang kuat dalam ranah keagamaan, seperti partisipasi yang setara dalam ibadah haji, namun agensi ini belum terwujud dalam bentuk kepemimpinan formal di institusi keagamaan. Organisasi perempuan seperti PKK dan KWT telah membuktikan diri sebagai agen perubahan yang efektif, namun potensi kemitraan strategis mereka dengan lembaga negara seperti Kantor Agama belum dimanfaatkan secara maksimal. Kantor Agama sendiri memiliki program-program dengan jangkauan luas seperti Bimbingan Perkawinan, tetapi belum mengoptimalkannya sebagai platform intervensi holistik yang responsif terhadap isu-isu gender krusial seperti KDRT, stunting, dan literasi finansial.

5.2. Rekomendasi Kebijakan (Tingkat Instusional)

Untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Kantor Agama Kabupaten Bengkayang direkomendasikan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan strategis berikut:

- **Rekomendasi 1: Menerapkan Mandat Data Terpilah Gender.** Sejalan dengan kebijakan nasional Pengarusutamaan Gender (PUG) , Kantor Agama Bengkayang harus menetapkan kebijakan internal yang mewajibkan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data terpilah gender untuk semua layanannya. Ini mencakup data pendaftar nikah berdasarkan usia, data pengajuan cerai berdasarkan pihak pemohon, data pendaftar haji, partisipasi dalam program penyuluhan, serta komposisi kepegawaian di semua tingkatan. Data ini akan menjadi dasar bagi perencanaan dan evaluasi program yang berbasis bukti.
- **Rekomendasi 2: Melaksanakan Audit Gender Internal.** Melakukan audit komprehensif terhadap kebijakan dan praktik Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk proses rekrutmen, kriteria promosi, dan akses terhadap pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan membongkar hambatan-hambatan sistemik yang menghalangi kemajuan karir perempuan ke posisi pimpinan, seperti Kepala KUA, dan menyusun rencana aksi afirmatif untuk mengatasinya.
- **Rekomendasi 3: Mengintegrasikan Indikator Gender dalam Perencanaan Strategis.** Dokumen perencanaan strategis berikutnya, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja (LKj), harus memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara eksplisit mengukur kemajuan kesetaraan gender. Indikator ini harus bersifat SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan mencakup target seperti "persentase perempuan dalam posisi eselon" atau "penurunan kasus KDRT pada keluarga yang mengikuti Bimwin".

5.3. Rekomendasi Programatik (Tingkat Komunitas)

Pada level implementasi program, rekomendasi difokuskan pada peningkatan relevansi dan dampak layanan bagi masyarakat:

- **Rekomendasi 4: Merevitalisasi Kurikulum Bimbingan Perkawinan.** Mentransformasi program Bimwin menjadi kursus "Ketahanan Keluarga" yang komprehensif. Ini dilakukan dengan menjalin kemitraan formal dengan dinas terkait untuk mengintegrasikan modul-modul wajib mengenai: (a) Kesehatan Ibu dan Anak & Pencegahan Stunting (dengan Dinas Kesehatan); (b) Literasi Keuangan Keluarga (dengan TPAKD/OJK); (c) Pencegahan KDRT dan Hak-hak Hukum dalam Perkawinan (dengan DSP3A); dan (d) Pola Asuh Digital yang Sehat untuk Keluarga.
- **Rekomendasi 5: Memformalkan Kemitraan Strategis.** Mengembangkan Nota Kesepahaman (MoU) dengan pimpinan TP-PKK dan koordinator KWT di tingkat kabupaten. Kemitraan ini harus mencakup desain dan pelaksanaan program bersama di tingkat komunitas, serta pelatihan bagi Penyuluh Agama untuk dapat berfungsi sebagai penghubung yang efektif dan fasilitator bagi kegiatan-kegiatan kelompok perempuan tersebut.
- **Rekomendasi 6: Meluncurkan Inisiatif "Keluarga Digital Cerdas".** Memanfaatkan jaringan 96 Penyuluh Agama sebagai agen literasi digital. Program ini harus fokus pada isu-isu yang relevan dengan keluarga, seperti cara mengidentifikasi hoaks, menghindari penipuan online, dan mempromosikan penggunaan internet yang aman dan positif bagi perempuan dan anak. Inisiatif ini akan secara langsung berkontribusi pada upaya mengatasi kesenjangan digital gender (

gender digital divide) dan mendukung agenda transformasi digital pemerintah yang lebih luas.